

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, cetakan kedua,
Jakarta : Sinar Grafika
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Tindak
Pidana Korupsi*, Bandung : Perseroan Terbatas Refika Aditama
- Chazawi, Adami, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di
Indonesia*, Malang : Banyumedia Publishing
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana
Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas* Jakarta : Sinar
Grafika
- Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran uang pengganti Dalam Perkara
Korupsi*, Jakarta : Solusi Publishing
- Kristian, 2018, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*,
Jakarta : Sinar Grafika
- Mertokusumo, S.H., Prof. Dr. Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah
Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana*

Korporasi, Jakarta : Prenamedia Group

Rastuti, Tuti, Gandhi Pharmacista dan Tisni Santika, 2018, *Aspek hukum*

Pengelolaan Perusahaan, Perseroan Terbatas, Refika, Bandung :

Aditama

Sjahdeini, Sutan Remi, 2017, *Ajaran Pidana Tindak Pidana*

Korporasi & Seluk -Beluknya, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana

Sjawie, Hasbullah F., 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta*

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta : Kencana

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*

(Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers

Subekti, S.H., Prof., 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa

Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap*

Tindakan Pemerintah, Jakarta : Sinar Grafika

Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,

2017, *Tata Cara penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta :

Mahkamah Agung RI dan KPK RI

Widjaja, Gunawan, 2008, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang*

Saham, Jakarta : Forum Sahabat

B. Makalah, Tesis dan Skripsi

Titiek Sri Wahyuni dalam Tesis : “*Pertanggungjawaban Pidana*

Korporasi (PT. PLN) dalam Tindak Pidana Perlindungan

Konsumen”, 2012, Makassar Universitas Hasanuddin

C. Artikel/Jurnal

Ashforth, B. E. and Anand, V., 2003, *The Normalization of Corruption in Organizations*, Research in Organizational Behaviour

Cuervo-Cazurra, A. 2016, *Corruption in International Business*, Journal of World Business, 51(1)

Castro, Armando, Nelson Phillips, and Shaz Ansari, *Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research*, Academy of Management Annals 2020, Vol. 14, No. 2

Box, Steven, 1983, *Power, Crime, and Mystification*, Routledge: New York

Castro, Armando, dkk, *Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research*, Academy of Management Annals 2020, Vol. 14, No. 2

Cazurra, A. Cuervo, 2016, *Corruption in International Business*, Journal of World Business, 51(1)

Cuadrado, Reyes Calderón, 2005, *Corruption: A Corporate Perspective*, Working Paper Nomor 11/05 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Navarra

Lubis, Muhammad Ridwan, dkk, 2021, *Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 8

D. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 3209)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana
Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/ A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman

Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014

tentang Pedoman Penanganan Perkara dengan Subyek Hukum

Korporasi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/ A/JA/

10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset